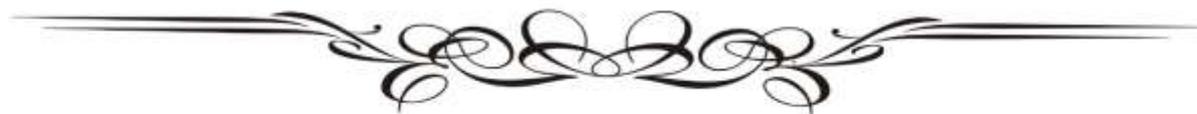


KLIPPING BERITA MEDIA MASSA



Rabu, 10 Juli 2019



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

KATA PENGANTAR

Kliping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Republika (Hal. 6)	Rabu, 10 Juli 2019	Jokowi Restui Industri Terpadu	Kemenkeu menyiapkan insentif fisik bagi investor. Untuk pengembangan industri terpadu di Jawa Tengah
2	Republika	Rabu, 10 Juli 2019	Dunia yang Kian Sesak	Setiap 14 bulan, warga dunia bertambah 100 juta jiwa. Pada 2050 diperkirakan populasi dunia akan mencapai 9 miliar jiwa
3	Republika	Rabu, 10 Juli 2019	Info Grafis	Fakta tentang Populasi Dunia Saat Ini
4	Media Indonesia (Hal. 2)	Rabu, 10 Juli 2019	Berita Foto	Destinasi wisata prioritas di NTT. Destinasi wisata Mulut Seribu di Kecamatan Landu Leko, Kabupaten Rote dilihat dari udara, kemarin. Destinasi tersebut berpotensi menjadi daya tarik baru untuk wisatawan
5	Media Indonesia (Hal. 3)	Rabu, 10 Juli 2019	Penataan Wilayah Pertahanan Ditingkatkan	Sejauh ini berbagai kebijakan pusat dan daerah belum sinkron yang integral dengan konsep penataan wilayah pertahanan.
6	Media Indonesia (Hal. 8)	Rabu, 10 Juli 2019	Kekeringan Mulai Melanda Purwakarta	13 kecamatan di Purwakarta mengalami rawan kekeringan atau masuk zona merah kekeringan
7	Koran Tempo (Hal. 7)	Rabu, 10 Juli 2019	Berita Foto	Warga mengambil air dari dasar sungai yang mengering di Grobogan, Jawa Tengah, kemarin. Warga mulai mengalami kesulitan air bersih
8	Koran Tempo (Hal. 17)	Rabu, 10 Juli 2019	Jalan Tol Cikampek Masih Lumpuh di Sejumlah Titik	BPTJ mengusulkan penerapan sistem baru arah kendaraan bergantian pada pagi dan siang
9	Koran Tempo (Hal. 18)	Rabu, 10 Juli 2019	Gerbang Tol Kalimalang Segera Dipasang Portal	Pemasangan portal dipercepat karena kemacetan di jalan tol Cikampek kian meluber ke jalan arteri
10	Koran Tempo (Hal. 22)	Rabu, 10 Juli 2019	Upaya Perbaikan Kinerja Investasi Dikebut	Pemerintah daerah didorong mempercepat pembangunan wilayah potensial. Pemerintah pusat menyiapkan insentif fiskal
11	Bisnis Indonesia	Rabu, 10 Juli 2019	Berharap Dana Talangan Cepat Cair	Pemerintah telah mempraktikkan skema pembayaran langsung pengadaan lahan yang baru
12	Bisnis Indonesia	Rabu, 10 Juli 2019	Kementerian PUPR Pacu Penyerapan	Realisasi penyerapan anggaran 2019 cukup rendah sebesar 26,18% per 8 Juli 2019. Hingga akhir tahun penyerapan diestimasi bakal mencapai 92,75%
13	Bisnis Indonesia	Rabu, 10 Juli 2019	Pembangunan Tetap Dimulai 2020	Untuk pembangunan Jembatan Batam dan Bintan dalam rangka upaya pengembangan wilayah.

Judul	Jokowi Restui Industri Terpadu	Tanggal	Rabu, 10 Juli 2019
Media	Republika (Hal. 6)		
Resume	Kemenkeu menyiapkan insentif fisik bagi investor. Untuk pengembangan industri terpadu di Jawa Tengah		

Jokowi Restui Industri Terpadu

● SAPTO ANDIKA CANDRA

Kemenkeu menyiapkan insentif fiskal bagi para investor.

BOGOR — Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan dengan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (9/7). Pertemuan tersebut membahas pengembangan industri terpadu di Jateng.

Ganjar menyebut Jokowi menerima usulannya untuk mengembangkan tiga kabupaten, yakni Magelang, Brebes, dan Kendal, sebagai sentra industri. Pengembangan industri di Jawa Tengah memang sedang dikejar untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Pengembangan industri yang dimaksud, jelas Ganjar, di antaranya adalah industri pariwisata terpadu di Magelang yang terletak di sekitar Candi Borobudur, industri alas kaki dan tekstil di Brebes, hingga pengembangan Kawasan Industri Kendal yang sudah dibangun bersama Singapura.

Khusus untuk kendal, sektor pariwisata juga akan dikembangkan seiring dengan pemanfaatan jalur pantai utara Jawa. Pengembangan kawasan industri di Jateng juga akan menggandeng Pemprov DI Yogyakarta karena kini sudah tersedia bandara baru

di Kulon Progo, yakni Yogyakarta International Airport. Bandara ini diyakini akan mendongkrak kunjungan wisatawan ke Borobudur.

“Jadi ada Kendal, Brebes, Borobudur dalam arti luas. Jadi ini konsep *integrated* antara Yogya dan Jateng,” kata Ganjar usai bertemu dengan Jokowi.

Pemerintah pusat, menurut Ganjar, juga menjanjikan memberikan insentif fiskal bagi investor yang mau menanamkan modalnya di tiga wilayah tersebut.

Salah satu iming-iming yang akan diberikan adalah insentif pajak, termasuk *tax holiday*. Pemerintah pun menjanjikan mempermudah perizinan bagi investor dalam memulai usaha.

Ganjar mengungkapkan, selama ini sering ada keluhan yang disampaikan pengusaha terkait bertele-telanya perizinan dan birokrasi yang rumit. Beranjak dari sana, Ganjar menjanjikan kemudahan bagi investor yang mau membuka usahanya di Jawa Tengah.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, Kementerian Keuangan akan mempertimbangkan jenis-jenis insentif yang akan disalurkan bagi investor sentra industri di Jateng.

Bentuk insentif yang paling memungkinkan, menurut Mardiasmo, adalah pemberian *tax holiday* yang akan dihubungkan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai *tax holiday* untuk kawasan berikat.

“Arahan Presiden seperti itu.

Nanti kita lihat dulu. BKPM yang nanti mengarahkan. Kalau perlu diberikan insentif, nanti kita dorong,” kata Mardiasmo.

Selain bertemu Ganjar, Jokowi menerima para pengusaha. Dalam pertemuan tertutup yang berlangsung sekitar satu jam, perwakilan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Kamar Dagang dan Industri (Kadin), dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) kembali menagih Presiden Jokowi untuk merampungkan revisi Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan.

Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani menyebutkan, amendemen UU Ketenagakerjaan harus menjadi prioritas pemerintah.

Ia beralasan, kondisi di lapangan saat ini menunjukkan adanya penyusutan serapan tenaga kerja di sektor formal. Revisi UU Ketenagakerjaan diharapkan mampu menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan meluluskan tenaga kerja yang terampil dan kompetitif.

“Karena ini *kan* bergulirnya di pemerintah. Pemerintah akan berbicara dengan DPR untuk melihat situasinya,” kata Hariyadi dalam kesempatan tersebut, Selasa (9/7).

Hariyadi menambahkan, ada enam isu ketenagakerjaan yang dibahas bersama Presiden Jokowi, yakni pengupahan, pesangon, alih daya (*outsourcing*), fleksibilitas jam kerja, serikat pekerja-buruh, dan tenaga kerja asing.

■ ed: satria kartika yudha

Judul	Dunia yang Kian Sesak	Tanggal	Rabu, 10 Juli 2019
Media	Republika		
Resume	Setiap 14 bulan, warga dunia bertambah 100 juta jiwa. Pada 2050 diperkirakan populasi dunia akan mencapai 9 miliar jiwa		

DUNIA YANG KIAN SESAK

● OLEH SIWI TRI PUJI B

Setiap 14 bulan, warga dunia bertambah 100 juta jiwa. Pada 2050, jumlah populasi dunia akan mencapai lebih dari 9 miliar jiwa.

Tiba-tiba pidato Presiden Tanzania, John Joseph Magufuli, tahun lalu kembali menjadi perbincangan tahun ini. Dalam sebuah acara di negaranya, ia mengingatkan warganya untuk tidak mendengarkan saran dari orang asing tentang kontrasepsi karena memiliki "motif jahat". Ia juga menyebut perempuan yang menggunakan alat kontrasepsi sebagai "wanita malas" - adalah tugas mereka untuk memiliki banyak anak.

Kini, menjelang Hari Populasi Sedunia yang jatuh setiap 11 Juli, namanya kembali disebut. Tepatnya, setelah badan dunia yang menangani soal kependudukan, United Nations Population Fund (UNFPA) menyebut sementara tren pertumbuhan penduduk dunia mengalami penurunan, akan stabil pada 2100 dengan angka fertilitas di bawah 2, Afrika justru melonjak. PBB memproyeksikan populasi Afrika naik tajam dari 1,34 miliar saat ini menjadi 4,28 miliar pada kurun itu. Pada tahun 2100, setengah dari bayi yang lahir di seluruh dunia diperkirakan ada di Afrika.

Setiap dua tahun, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan estimasi terbaru tren populasi dunia. Berbeda dengan dasawarsa lalu, proyeksi 2019 mengungkapkan perbedaan besar. Di seluruh Asia, Eropa, dan Amerika, stabilitas populasi telah tercapai atau segera akan terjadi, dengan proyeksi median menunjukkan peningkatan dari 6,4 miliar hari ini menjadi 6,5 miliar pada tahun 2100. Ya, kenaikannya hanya pada kisaran 2

persen, kecuali Afrika.

Lebih dari beberapa dekade, tren populasi sangat bergantung pada perkiraan tingkat fertilitas di masa depan, yang secara inheren tidak pasti. Tetapi di semua negara maju di dunia, pola kesuburan saat ini telah bertabun begitu lama sehingga tampaknya tetap merupakan fitur yang stabil dari sebuah masyarakat.

Di semua negara maju secara ekonomi, angka fertilitas -- merujuk pada jumlah anak per perempuan di sebuah wilayah atau negara -- turun dengan cepat antara akhir abad ke-19. Kontrasepsi yang menjadi semakin mudah didapat dan makin tinggi tingkat pendidikan dan partisipasi yang lebih besar dalam sektor formal kaum perempuan menjadi salah satu penyebabnya.

Angka fertilitas Eropa utara dan barat turun di bawah 2 pada awal 1970-an, dan Eropa selatan mengikuti satu dekade kemudian. Kini rata-rata angka fertilitas Eropa ada pada kisaran 1,6 dan tak ada satu negarapun di atas 1,85.

Angka fertilitas Kanada tidak pernah di atas 2 sejak awal 1970-an dan saat ini berada di angka 1,53; dan angka fertilitas Amerika Serikat, yang turun di bawah 2 pada tahun 1970-an, naik sedikit di atas 2 pada tahun 1990-an karena imigran yang baru datang dari Amerika Latin pada awalnya memiliki tingkat kesuburan yang lebih tinggi daripada populasi non-Hispanik. Tetapi dengan tingkat kesuburan kelompok Hispanik sekarang menurun juga, rata-rata angka fertilitas AS saat ini adalah 1,78.

Saat ini, ada fenomena yang diakui banyak kalangan bahwa; di semua negara yang telah mencapai status pendapatan menengah, dan di mana kaum perempuan mendapatkan pendidikan yang baik dan memiliki kebebasan reproduksi, maka angka fertilitas di negara itu berada pada atau di bawah 2. Bahkan di beberapa negara maju seperti Jepang, angkanya jauh di bawah itu.

Tantangan menghadang

Tapi sebelum sampai pada 2100, mari bicara kondisi saat ini. Ada sekitar 7,7

miliar pria, wanita, dan anak-anak yang berbagi hidup di planet ini, dari hanya 1,9 miliar jiwa seabad lalu. Dan meskipun populasi telah stabil di banyak wilayah di bumi, khususnya Eropa dan Amerika Utara, pertumbuhan penduduk berada pada tingkat yang mengkhawatirkan, yaitu tumbuh sekitar 100 juta jiwa setiap 14 bulan. Pada tahun 2050, populasi bumi akan mencapai 9,7 miliar dan akan terus meningkat, mencapai angka sekitar 10,9 miliar pada tahun 2100.

Tantangan jelas menghadang. Yang paling sederhana, adalah ketersediaan pangan dunia. Untuk memberi makan 10 miliar jiwa, maka akan banyak hutan dan lembah yang harus dialihkan ke sektor pertanian untuk memberi makan kita. Belum lagi ketersediaan papan alias tempat tinggal. "Planet kita tidak dapat menahan jumlah sebanyak itu," kata pakar paleontologi, Peter Ward.

Hal yang sama pernah diingatkan filsuf yang hidup pada akhir abad ke-18, Thomas Malthus. Ia menulis kata-kata yang tidak menyenangkan dalam sebuah esai tentang apa yang dia lihat sebagai masa depan kemanusiaan yang mengerikan. Desakan manusia yang tak terpadamkan untuk bereproduksi, kata Malthus, pada akhirnya akan mengarahkan kita untuk kelebihan populasi planet ini, memakan semua sumber dayanya dan mati dalam kelaparan massal.

"Kekuatan populasi akan sangat unggul dari kekuatan bumi untuk menghasilkan subsistensi bagi manusia, sehingga pada akhirnya akan berujung pada kematian dini dalam bentuk tertentu akan datang pada umat manusia," tulisnya.

Banyak ilmuwan berpendapat bahwa bumi memiliki daya dukung maksimum untuk 9 miliar hingga 10 miliar jiwa saja. Salah satu ilmuwan tersebut, sosiobiolog Universitas Harvard, Edward O Wilson, mendasarkan perkiraannya pada perhitungan sumber daya bumi yang tersedia. Seperti yang ditunjukkan Wilson dalam *The Future of Life*, selain ketersediaan air tawar yang terbatas, kendala utama adalah pada jumlah makanan yang dapat dihasilkan bumi, seperti yang dikemukakan

Malthus lebih dari 200 tahun yang lalu. Bahkan dalam kasus efisiensi maksimum, di mana semua biji-bijian yang ditanam didedikasikan untuk memberi makan manusia (bukan ternak). "Jika semua orang setuju untuk menjadi vegetarian, menyisakan sedikit atau tidak sama sekali untuk ternak, 3,5 miliar hektare lahan subur akan mendukung sekitar 10 miliar jiwa," tulis Wilson.

Lahan seluas itu akan menghasilkan sekitar 2 miliar ton biji-bijian setiap tahun, jelasnya. Itu cukup untuk memberi makan 10 miliar vegetarian, tetapi hanya akan memberi makan 2,5 miliar omnivora AS, karena begitu banyak vegetasi yang didedikasikan untuk ternak dan unggas di AS.

Menurut ahli biologi populasi Joel Cohen dari Universitas Columbia, faktor lingkungan lain yang membatasi daya dukung bumi adalah siklus nitrogen, jumlah fosfor yang tersedia, dan konsentrasi karbon atmosfer, dan sejumlah besar ketidakpastian dampak dari semua faktor ini. "Namun, tidak ada yang tahu kapan atau pada level berapa populasi puncak akan tercapai," kata Cohen.

Untungnya, kita dapat terhindar dari fase akhir kelebihan populasi dan kelaparan yang dibayangkan oleh Malthus. Perkiraan PBB tentang tren populasi global menunjukkan bahwa keluarga semakin kecil. "Data empiris dari 230 negara sejak 1950 menunjukkan bahwa mayoritas besar mengalami penurunan kesuburan," kata Gerhard Heilig, kepala bagian perkiraan populasi dan proyeksi di UNFPA.

Pengecualiannya, Afrika. Saat ini ada sekitar 1,2 miliar jiwa di Afrika. Pada 2100, akan ada lebih dari 4 miliar jiwa. Krisis populasi yang terus meningkat perlu ditangani di sana sebagai prioritas.

Sejarah mencatat bahwa banyak negara di Afrika cenderung menjadi sangat tidak ramah ketika pemanasan global mencengkeram bumi. Gelombang panas, kelaparan, dan kekeringan dengan mudah menyapu tanah mereka. Konflik sumber daya menjadi tak terelakkan. Ini sebabnya, pernyataan Presiden Magufuli menjadi renungan bersama menjelang Hari Populasi Sedunia, besok. ■

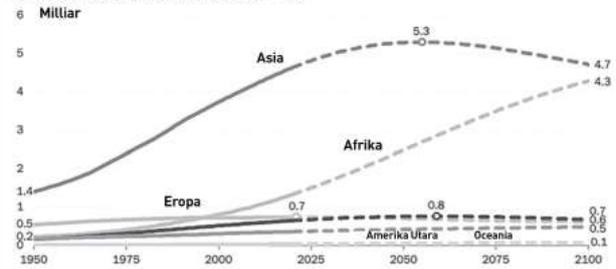
Judul	Info Grafis	Tanggal	Rabu, 10 Juli 2019
Media	Republika		
Resume	Fakta tentang Populasi Dunia Saat Ini		

Fakta tentang Populasi Dunia Saat Ini

- Kesuburan global menurun saat dunia kian menua. Tingkat kesuburan global diperkirakan hanya 1,9 kelahiran per wanita pada 2100, turun dari 2,5 pada hari ini. Angka ini diproyeksikan akan jatuh di bawah tingkat kesuburan pengganti (2,1 kelahiran per wanita) pada tahun 2070. Tingkat kesuburan pengganti adalah jumlah kelahiran per wanita yang dibutuhkan untuk mempertahankan ukuran sebuah populasi.
- Usia rata-rata warga dunia diperkirakan akan meningkat menjadi 42 pada tahun 2100, naik dari 31 saat ini - dan dari 24 pada tahun 1950. Antara tahun 2020 hingga 2100, jumlah orang yang berusia 80 tahun atau lebih diperkirakan akan meningkat dari 146 juta menjadi 881 juta jiwa. Mulai tahun 2073, diproyeksikan akan ada lebih banyak orang berusia 65 tahun ke atas ketimbang yang berusia di bawah 15 tahun; merupakan hal yang baru pertama kali terjadi sepanjang sejarah manusia.
- Afrika adalah satu-satunya wilayah di dunia yang diproyeksikan memiliki pertumbuhan populasi yang meningkat selama sisa abad ini. Antara tahun 2020 hingga 2100, populasi Afrika diperkirakan akan meningkat dari 1,3 miliar menjadi 4,3 miliar jiwa.
- Eropa dan Amerika Latin diperkirakan memiliki populasi yang menurun pada tahun 2100. Populasi Eropa diproyeksikan mencapai puncaknya pada angka 748 juta jiwa pada tahun 2021. Wilayah Amerika Latin dan Karibia diperkirakan akan melampaui populasi Eropa pada tahun 2037, mencapai 768 juta pada tahun 2058.
- Populasi Asia diperkirakan meningkat dari 4,6 miliar pada tahun 2020 menjadi 5,3 miliar pada tahun 2055, kemudian mulai menurun. Populasi Cina diperkirakan akan memuncak pada 2031, sementara populasi Jepang dan Korea Selatan diproyeksikan akan menurun setelah tahun 2020. Populasi India diperkirakan akan tumbuh hingga 2059, mencapai 1,7 miliar jiwa. Sementara itu, Indonesia - negara terpadat di Asia Tenggara saat ini - diproyeksikan mencapai populasi puncaknya pada 2067.
- Di wilayah Amerika Utara, migrasi dari seluruh dunia diharapkan menjadi pendorong utama pertumbuhan populasi yang berkelanjutan. Populasi imigran di AS diperkirakan akan mengalami peningkatan bersih sebesar 85 juta selama 80 tahun ke depan (2020-2100) menurut proyeksi PBB, kira-kira sama dengan total sembilan negara tertinggi berikut-

PERTUMBUHAN POPULASI DI AFRIKA YANG TERCEPAT SEPANJANG ABAD INI

Pertumbuhan populasi berdasar wilayah, dalam miliar



Tabel di atas adalah proyeksi puncak pertumbuhan populasi tiap wilayah: Eropa (2021), Asia (2055), dan Amerika Latin serta Kepulauan Karibia (2037). Pembagian wilayah mengikuti data Perserikatan Bangsa-Bangsa dan diolah oleh PEW Research Center. Seluruh data yang diolah berasal dari laporan *World Population Prospects 2019* yang disusun Divisi Populasi Departemen Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Sumber: PEW Research Center

- nya yang digabungkan. Di Kanada, migrasi cenderung menjadi pendorong utama pertumbuhan, karena angka kematian di Kanada diperkirakan akan melebihi jumlah kelahiran.
- Pada tahun 2100, lima dari 10 negara berpenduduk terbesar di dunia diproyeksikan berada di Afrika. Populasi global diperkirakan akan tumbuh sekitar 3,1 miliar jiwa antara tahun 2020-2100. Lebih dari setengah peningkatan ini diproyeksikan berasal dari Nigeria, Republik Demokratik Kongo, Tanzania, Ethiopia, dan Angola, bersama dengan satu negara non-Afrika (Pakistan).
- India diproyeksikan melampaui Cina sebagai negara terpadat di dunia pada tahun 2027. Sementara itu, Nigeria akan melampaui AS sebagai negara terbesar ketiga di dunia pada tahun 2047.
- Antara 2020 hingga 2100, 90 negara diperkirakan akan kehilangan populasi. Dua pertiga dari semua negara dan teritori berada di Eropa (32 dari 48 negara) diperkirakan akan kehilangan populasi pada tahun 2100. Di Amerika Latin dan Karibia, setengah dari populasi di kawasan itu diperkirakan akan menyusut. ■

Judul	Berita Foto	Tanggal	Rabu, 10 Juli 2019
Media	Media Indonesia (Hal. 2)		
Resume	Destinasi wisata prioritas di NTT. Destinasi wisata Mulut Seribu di Kecamatan Landu Leko, Kabupaten Rote dilihat dari udara, kemarin. Destinasi tersebut berpotensi menjadi daya tarik baru untuk wisatawan		



MPPALCE AMALO

DESTINASI WISATA PRIORITAS DI NTT: Keindahan destinasi wisata Mulut Seribu di Kecamatan Landu Leko, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), dilihat dari udara, kemarin. Mulut Seribu merupakan satu dari tujuh lokasi wisata prioritas yang dikembangkan Pemerintah Provinsi NTT. Mulut Seribu merupakan gugusan pulau kecil yang mirip lokasi wisata Raja Ampat di Papua Barat.

Judul	Penataan Wilayah Pertahanan Ditingkatkan	Tanggal	Rabu, 10 Juli 2019
Media	Media Indonesia (Hal. 3)		
Resume	Sejauh ini berbagai kebijakan pusat dan daerah belum sinkron yang integral dengan konsep penataan wilayah pertahanan.		

Penataan Wilayah Pertahanan Ditingkatkan

PENATAAN wilayah pertahanan yang merupakan kawasan strategis nasional harus diprioritaskan. Wilayah pertahanan pun mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional, khususnya terhadap kedaulatan negara, pertahanan, dan keamanan negara.

Demikian penegasan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu di sela-sela acara simposium Penataan Wilayah Pertahanan dalam Rangka Mewujudkan Pertahanan Negara yang Tangguh, di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, kemarin.

Sejauh ini berbagai kebijakan pembangunan di tingkat pusat dan daerah justru belum memiliki sinkronisasi yang integral dengan konsep penataan wilayah pertahanan. Pembangunan infrastruktur yang masif seharusnya bisa disinergikan dengan konsep penataan wilayah untuk kepentingan pertahanan negara.

“Pada hakikatnya penyiapan wilayah pertahanan negara ialah kegiatan menyusun tata ruang wilayah pertahanan dengan terwujudnya

ruang juang yang tangguh. Itu berupa wilayah pertahanan yang siap sebagai mandala perang atau operasi guna mendukung pertempuran strategis,” ujar Ryamizard.

Menurut dia, pembangunan pelabuhan udara dan laut, jalan bebas hambatan, jembatan, dan jalan-jalan negara yang sudah hampir membuka akses ke penjuru Tanah Air sedianya perlu disinkronisasi dengan kepentingan pertahanan. Langkah itu juga sejalan dengan ketentuan UU 68/2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara.

Wapres ke-6 RI Try Sutrisno menambahkan, pengelolaan tata ruang nasional yang ditinjau dari kepentingan nasional Barat, satu keping mata uang dengan 2 sisi yang tidak terpisahkan. Setiap ruang itu dibagi untuk menampung aspirasi atau kepentingan, seperti kesejahteraan berupa pembangunan pertanian, perikanan, prasarana perindustrian, dan permukiman. Di sisi lain, hal itu untuk menampung kepentingan keamanan nasional. (Gol/P-1)

Judul	Kekeringan Mulai Melanda Purwakarta	Tanggal	Rabu, 10 Juli 2019
Media	Media Indonesia (Hal. 8)		
Resume	13 kecamatan di Purwakarta mengalami rawan kekeringan atau masuk zona merah kekeringan		

Kekeringan Mulai Melanda Purwakarta

PEMERINTAH Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, menyiapkan anggaran sebesar Rp350 juta untuk menanggulangi kekeringan akibat kemarau. Selain itu, Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) juga telah siap menyalurkan air bersih untuk warga yang mulai kesulitan mendapatkannya.

Saat ini, dana penanggulangan bencana tersebut, telah tersimpan di dua dinas, yaitu Dinas Damkar sebesar Rp150 juta dan di Bagian Kesra Setda Purwakarta Rp200 juta. Dana itu siap dikucurkan jika dampak kekeringan semakin meluas.

Sebagai informasi, dari 17 kecamatan di Purwakarta, 13 di antaranya masuk kategori rawan kekeringan atau zona merah sehingga dinyatakan siaga kekeringan. Menurut Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Purwakarta, Wahyu Wibisono, pihaknya

sudah bersiaga untuk memenuhi permintaan air bersih dari masyarakat.

Terpisah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, sejauh ini telah menyalurkan sekitar 60 ribu liter air bersih untuk masyarakat yang terdampak kekeringan. Sampai saat ini, enam kecamatan telah melaporkan mengalami krisis air bersih.

"Kami sudah menyalurkan air bersih memakai 12 tangki. Satu tangki berkapasitas 5.000 liter," kata Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Kabupaten Sukabumi, Eka Widiawan, kemarin. Enam wilayah yang mendapatkan air bersih, yakni Kecamatan Gunungguruh, Palabuhan Ratu, Gegerbitung, Ciselok, dan Simpenan.

Sementara itu, produksi salak di Desa Srumbung, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, dilaporkan menurun akibat

kemarau. Menurut petani di Desa Srumbung, Rahmah, produksi salak sudah anjlok 70%.

"Bisa lihat sendiri, jumlah salak yang dijual berkurang," keluhnya. Dia melanjutkan, pada musim hujan, produksi salak biasanya melimpah. Tapi, pada kondisi sekarang, yakni siang kering dan malam lembab, tidak cocok untuk salak.

Akibatnya, tanaman salak tidak bisa berbuah maksimal. "Padahal, salak bisa dipanen sepanjang tahun," tuturnya. Meski begitu, para petani berupaya agar bunga salak mereka tidak rontok selama musim kering.

Sebagian menutup bunga salak dan mengaliri lahan dengan air. Menurut Rahmah, jika kondisi normal, petani bisa memanen 5 ton salak per hektare. (RZ/BB/LN/YK/CS/UL/AD/BY/JI/N-3)

Judul	Berita Foto	Tanggal	Rabu, 10 Juli 2019
Media	Koran Tempo (Hal. 7)		
Resume	Warga mengambil air dari dasar sungai yang mengering di Grobogan, Jawa Tengah, kemarin. Warga mulai mengalami kesulitan air bersih		

ANTARA FOTO/YUSUF NUGROHO



Kesulitan Air. Warga mengambil air dari lubang di dasar sungai yang mengering di Dukuh Karanganyar, Geyer, Grobogan, Jawa Tengah, kemarin. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah mencatat terdapat 96 desa yang kesulitan air bersih di Grobogan.

Judul	Jalan Tol Cikampek Masih Lumpuh di Sejumlah Titik	Tanggal	Rabu, 10 Juli 2019
Media	Koran Tempo (Hal. 17)		
Resume	BPTJ mengusulkan penerapan sistem baru arah kendaraan bergantian pada pagi dan siang		

Jalan Tol Cikampek Masih Lumpuh di Sejumlah Titik

BPTJ mengusulkan penerapan sistem satu arah kendaraan, bergantian pada pagi dan siang.

Francisco Rosarians
francisco@tempo.co.id

JAKARTA – Iring-iringan kendaraan pribadi mulai merayap ketika memasuki jalan tol Jakarta-Cikampek Kilometer 8. Pengemudi harus sering-sering menginjak rem sejak beberapa ratus meter menjelang gerbang tol Jatibening itu, kemarin siang.

Satu per satu kendaraan melewati gerbang tol di wilayah Bekasi, Jawa Barat, tersebut. Namun, setelah melewati gerbang tol, pengemudi tak bisa segera tancap gas. "Cikunir-Tambun kecepatan 5-10 km/jam," demikian tertulis pada papan pengumuman digital atau *variable message sign* (VMS) di sisi gerbang tol Jatibening.

Beberapa hari terakhir, kemacetan parah terjadi di jalan tol Jakarta-Cikampek. Penyebabnya adalah pengerjaan tiga proyek infrastruktur nasional, yakni proyek jaringan kereta ringan alias *light rail transit* (LRT) Jakarta Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek), proyek jalan tol layang (*elevated*), dan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Puncak kemacetan terjadi pada Sabtu lalu. Kala itu, lalu lintas tak



Kepadatan kendaraan di ruas jalan tol Jakarta-Cikampek kawasan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

hanya terkunci di jalan tol Jakarta-Cikampek. Kemacetan meluber ke jalan arteri, termasuk Jalan Kalimalang dan jalan-jalan lain di Kota Bekasi.

Kemacetan luar biasa itu terjadi setelah PT Jasa Marga mengimbau pengendara untuk keluar dari jalan tol dan menggunakan ruas arteri. Karena jalan tol Jakarta-Cikampek terkunci, sebagian kendaraan yang hendak berangkat ke Bandung memutar balik ke arah jalan tol Jagorawi. Akibatnya, jalur menuju Puncak, Bogor, pun macet total. Di Kota Bekasi dan Bogor, kemacetan merata selama 7-9 jam.

Kemarin, tim *Tempo* menelusuri jalan tol Jakarta-Cikampek dengan rute pergi-pulang. Tim berangkat sekitar pukul 12.30 menuju Karawang Barat, yang menjadi titik akhir pembangunan jalan tol layang Jakarta-Cikampek. Laju kendaraan mulai tersendat tak lama setelah melewati Cawang atau Halim.

Memasuki simpang susun Cikunir, kemacetan yang terjadi sejak di gerbang tol Jatibening makin parah. Di wilayah ini, ruas jalan tol tampak semrawut. Pengerjaan proyek tol layang menutup beberapa ruas jalan. Sejumlah pekerja tampak menaikan sejumlah material fondasi jalan dengan alat berat. Pengerjaan proyek terus berjalan meski kendaraan kian menumpuk.

Kemacetan juga diperparah oleh truk dan kendaraan besar lain yang masuk ke jalan tol Cikampek dari jalan tol lingkaran luar Jakarta dan Jagorawi. Di ruas jalan tol yang menyempit, kemacetan makin menjadi-jadi. Kendaraan berbadan besar yang datang dari tiga arah hanya bisa merayap bak siput.

"Memang sedang ada pekerjaan. Seharusnya tidak lewat sini," kata seorang pekerja proyek jalan tol layang. Deretan kendaraan

mengular hingga Kilometer 16 atau di sekitar gerbang tol Bekasi Timur. Mobil baru bisa dipacu dengan kecepatan hingga 60 kilometer per jam setelah mendekati gerbang tol Tambun. Namun kemacetan kembali terjadi menjelang gerbang tol Cibitung. Di sini, biang kemacetan adalah truk-truk dan kendaraan besar yang mendadak berpindah ke ruas kiri untuk keluar dari jalan tol.

Mobil *Tempo* kembali berjalan dengan kecepatan 5 kilometer per jam sejak melintasi gerbang tol Cibatu. Di titik ini, ruas tol Cikampek kembali mengalami penyempitan karena digunakan untuk pembangunan jalan tol layang. Beberapa bagian jalan juga dijadikan tempat menumpuk material dan peralatan proyek.

Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Bambang Prihartono, mengatakan lembaganya telah mengusulkan penerapan kebijakan satu arah atau *one way* seperti pada masa mudik dan balik Lebaran lalu. "Terapkan saja, pukul 10.00 hingga 02.00 WIB satu arah menuju Cikampek. Pukul 02.00 hingga 05.00 WIB satu arah ke Jakarta," kata dia.

PT Jasa Marga dan anak usahanya, PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek (JJC), mengklaim telah menerapkan sistem *window time* atau pelaksanaan pekerjaan di luar waktu sibuk kendaraan. "Memang banyak proyek nasional di tol Cikampek. Pasti mengurangi kapasitas jalan," kata juru bicara PT Jasa Marga, Heru Santoso.

Kemacetan di jalan tol Jakarta-Cikampek tampaknya tak akan segera berlalu. PT JJC, misalnya, masih menyisakan pemasangan sekitar 139 *steel box girder* untuk konstruksi tol layang. Untuk mengurangi kemacetan, PT JJC mengklaim hanya melakukan pekerjaan tersebut pukul 22.00-05.00.

● IMAM HAMDANI

Judul	Gerbang Tol Kalimalang Segera Dipasangi Portal	Tanggal	Rabu, 10 Juli 2019
Media	Koran Tempo (Hal. 18)		
Resume	Pemasangan portal dipercepat karena kemacetan di jalan tol Cikampek kian meluber ke jalan arteri		



Pengendara melintas di samping pembangunan proyek nasional tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) di Jalan Arteri Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin lalu.

Gerbang Tol Kalimalang Segera Dipasangi Portal

Pemasangan portal dipercepat karena kemacetan di jalan tol Cikampek kian meluber ke jalan arteri.

Francisco Rosarians
francisco@tempo.co.id

JAKARTA – Pemerintah Kota Bekasi akan memasang portal penghalang kendaraan besar di muka gerbang tol Kalimalang pekan depan. Portal itu dipasang untuk menghalau truk besar dan kontainer yang kerap menjadikan Jalan Kalimalang serta jalan lain di Kota Bekasi sebagai jalur alternatif menuju kawasan industri. "Kelas jalannya berbeda. Ini bukan jalan nasional. Jalan Kalimalang itu jalan kota," kata Kepala Seksi Pengendalian Operasi dan Keselamatan Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Bambang Nurmanan Putra, kepada Tempo, kemarin. Dinas Perhubungan Kota Bekasi mempercepat pemasangan portal penghalang akibat kemacetan parah yang terjadi di

"Selain karena pembangunan proyek infrastruktur, kemacetan terjadi akibat jam operasional truk bermuatan besar bersamaan dengan waktu pulang atau berangkat kerja masyarakat."

Bambang Prihartono
Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

Jalan Kalimalang, Sabtu lalu. Saat itu, ratusan kendaraan masuk ke Jalan Kalimalang akibat jalan tol Jakarta-Cikampek lumpuh total. Para pengemudi yang menuju Cikarang hingga Bandung memilih keluar melalui gerbang tol Jatibening. Kemacetan di Jalan Kalimalang kian parah karena ratusan pengemudi kendaraan besar yang melintasi jalan tol lingkaran luar Jakarta juga keluar di gerbang tol Pondok Kelapa dan Kalimalang II. Akibatnya, kemacetan tak hanya terjadi di ruas arteri Kalimalang, tapi juga meluas ke ruas jalan lain di Kota Bekasi. Kemacetan di jalan tol Cikampek dan simpang susun Cilunir terjadi karena penyempitan ruas jalan tol lantaran pembangunan tiga proyek infrastruktur nasional, yaitu jalur kereta *light rail transit* (LRT), jalan tol layang Jakarta-

Cikampek, dan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung. Pengerjaan proyek ini mengurangi lebar badan jalan sebanyak 2-3 ruas. Menurut Bambang, Pemerintah Kota Bekasi sebelumnya tak keberatan bila pengendara menggunakan Jalan Kalimalang untuk menuju Cikarang, Bandung, atau Pantai Utara Jawa (Pantura). Namun belakangan Jalan Kalimalang sudah terbebani oleh pembangunan jalan tol layang Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu). Saat ini, proyek tersebut tengah menuntaskan jalur tol dari gerbang tol Pondok Kopi menuju Bekasi Barat. "Agustus nanti harus sudah steril (dari kendaraan besar). Karena kami akan menutup (beberapa ruas) jalan untuk pembangunan tol Becakayu," ujarnya. Berdasarkan pantauan Tempo, sejak beberapa hari

Beban Ruas Jakarta-Cikampek

SELAMA pembangunan infrastruktur belum selesai, kemacetan tampaknya akan menjadi pemandangan sehari-hari di jalan tol Jakarta-Cikampek. Hingga saat ini, ada tiga proyek yang pengerjaannya memakan badan jalan tol. Target penyelesaian tiap proyek pun bervariasi.

1. Light Rail Transit (LRT)

Rute : Cawang, Jakarta Timur-Jatimulya, Bekasi Timur
Panjang : 13,7 kilometer
Lebar : 14,3 meter
Pengembang : PT Adhi Karya
Operator : PT Kereta Api Indonesia
Lokasi : Sisi utara jalan tol atau jalur Jakarta menuju Cikampek
Kemajuan : Pembangunan fase I LRT Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) baru di tahap pekerjaan konstruksi stasiun dan jalur kereta.
Pantauan : Semua stasiun LRT belum selesai.

2. Jalan Tol Layang (Elevated)

Rute : Jakarta-Cikampek, Jawa Barat
Panjang : 29 kilometer
Lebar : 4 lajur (2 lajur di tiap arah)
Titik mulai : Kilometer 9 atau simpang susun Cikunir
Titik akhir : Kilometer 48 atau gerbang tol Karawang Barat
Pengembang : PT Jasa Marga Jalan Layang Cikampek
Operator : PT Jasa Marga
Lokasi : Di tengah badan jalan tol Cikampek
Kemajuan : Baru menyelesaikan 83 persen pekerjaan dan diprediksi rampung akhir 2019.
Pantauan : Pembangunan di beberapa titik masih jauh dari selesai. Beberapa struktur fondasi dasar jalan layang masih tergeletak di badan jalan tol.

3. Kereta Cepat

Rute : Jakarta-Bandung
Panjang : 142 kilometer
Pengembang : PT Kereta Cepat Indonesia China
Lokasi : Sisi selatan jalan tol Cikampek atau ruas jalur Cikampek menuju Jakarta
Kemajuan : Baru menyelesaikan 23 persen pekerjaan dengan target rampung pada 2021. Masih berlangsung pekerjaan konstruksi di 140 titik terpisah. Ada juga pembangunan satu terowongan, dari target 13 ruas tunnel.
Pantauan : Konstruksi utama proyek kereta cepat belum terlihat.

● FRANCISCO ROSARIANS

terakhir, petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi berjaga-jaga di muka Jalan Kalimalang, terutama di akses keluar dari gerbang tol Pondok Kelapa dan Kalimalang II. Mereka berupaya menghalau kendaraan besar, yang beberapa di antaranya berpelat nomor dengan kode awal huruf "T" (Karawang) dan "BK" (Sumatera Utara). Namun penjagaan itu hanya berlangsung sejak pagi hingga sekitar pukul 21.00. Di luar waktu tersebut, kendaraan besar masih terlihat menyusup ke ruas arteri Kota Bekasi. "Makanya, pemasangan portal jadi urgent (mendesak)," kata Bambang. Sukma Wijayanto, penguna Jalan Kalimalang, mengatakan kondisi jalan tol Cikampek dan jalan alternatif (Kalimalang) sama-sama macet. Kedua-

nya macet parah saat jam-jam sibuk, seperti pagi dan sore. "Semua sudah sama saja. Macet di mana-mana," ucapnya. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, Bambang Prihartono, menerangkan, selain karena pembangunan proyek infrastruktur, kemacetan terjadi akibat jam operasional truk bermuatan besar bersamaan dengan waktu pulang atau berangkat kerja masyarakat. "Truk-truk raksasa baru masuk jalan tol setelah muatan penuh di pelabuhan, bersamaan dengan jam pulang kantor. Kalau bersamaan, pasti memadati jalan tol," tutur Prihartono. ● ADI WARSONO

Judul	Upaya Perbaikan Kinerja Investasi Dikebut	Tanggal	Rabu, 10 Juli 2019
Media	Koran Tempo (Hal. 22)		
Resume	Pemerintah daerah didorong mempercepat pembangunan wilayah potensial. Pemerintah pusat menyiapkan insentif fiskal		

Upaya Perbaikan Kinerja Investasi Dikebut

Pemerintah daerah didorong mempercepat pembangunan wilayah potensial. Pemerintah pusat menyiapkan insentif fiskal.

TEMPO/ABDI PURNAMA



Wisatawan di Pos Jemplang atau Simpang Jemplang di dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Desa Ngadas, Kabupaten Malang, Jawa Timur, 2017.

Ghoida Rahmah

ghoida.rahmah@tempo.co.id

JAKARTA – Kinerja ekspor dan investasi yang masih belum mengembirakan menjadi pekerjaan rumah utama pemerintah. Pasalnya, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga mencapai target 5,3 persen tahun ini, realisasi ekspor dan investasi yang kuat dibutuhkan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengungkapkan salah satu upaya yang ditempuh pemerintah pusat adalah mempercepat pembangunan di daerah-daerah yang potensial. "Kami bersama Presiden dan Gubernur Jawa Tengah dan Jawa Timur sudah berdiskusi bersama, dan Presiden meminta agar para gubernur fokus membangun kawasannya masing-masing, sehingga

mendorong investasi masuk dengan sendirinya," ujar Bambang selepas rapat di Istana Bogor, Jawa Barat, kemarin.

Bambang menjelaskan pemerintah memusatkan fokus pada kawasan prioritas, seperti kawasan industri di Brebes, kawasan industri di Kendal, dan kawasan pariwisata Borobudur untuk Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya, untuk Provinsi Jawa Timur, pemerintah di Kendal, dan kawasan pariwisata Borobudur untuk Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya, untuk Provinsi Jawa Timur, pemerintah di Kendal, dan kawasan pariwisata Borobudur untuk Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya, untuk Provinsi Jawa Timur, pemerintah di Kendal, dan kawasan pariwisata Borobudur untuk Provinsi Jawa Tengah.

Tak hanya itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan siap untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional

dengan mendukung perkembangan produk-produk potensial berorientasi ekspor. "Kami juga akan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memajukan produk-produk lokal Jawa Tengah, seperti makanan dan minuman, tekstil, hingga furnitur," kata dia.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan sejumlah fokus percepatan pembangunan lainnya yang juga mendesak untuk direalisasi. "Ada persoalan konektivitas seperti transportasi publik untuk kawasan metropolitan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan (Gerbang Kertosusilo)," ucap Khofifah. *Mass rapid transit* (MRT) pun menjadi salah satu jenis transportasi umum yang dibidik untuk dikembangkan.

Tak hanya dari segi infrastruktur, pemerintah secara agresif akan memberikan sejumlah insentif pajak (fiskal) agar investor tera-

rik menanamkan modalnya di dalam negeri. Kemarin, pemerintah baru saja menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 mengenai pemberian diskon pajak super atau *super deduction* tax sebesar 200 persen bagi pelaku usaha dan industri yang mengembangkan kegiatan investasi. Berikutnya, pemerintah juga merilis diskon pajak sebesar 300 persen bagi mereka yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan. Insentif *tax allowance* pun diberikan pemerintah bagi industri padat karya yang bernilai strategis.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berujar segenap insentif fiskal yang telah jorjoran diberikan itu diharapkan dapat berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing perekonomian. Dia menambatkan, selain insentif fiskal, satu lagi insentif yang diminta oleh Presiden Joko Widodo untuk segera diwujudkan adalah insentif di bidang perizinan

dan birokrasi. "Presiden ingin kita memberikan kemudahan untuk proses, seperti mendapatkan tanah dan lainnya. Nanti dilihat dan ditindaklanjuti oleh para menteri lain melalui instrumen kebijakan yang mereka miliki," kata Sri Mulyani.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Shinta W. Kamdani membenarkan bahwa iklim usaha dalam negeri saat ini masih belum cukup kompetitif dan menarik bagi investor. Dia pun menyambut positif rencana pemerintah untuk mempercepat perbaikan iklim investasi dari berbagai aspek. Namun, di tengah kondisi dunia usaha yang lesu dan tertekan akibat gejala perekomian global, menurut Shinta, dibutuhkan satu kebijakan yang lebih cepat terasa dampaknya. "Di antaranya adalah menurunkan suku bunga untuk menggairahkan bisnis. Ini kan prosesnya lebih mudah kami berharap dari Bank Indonesia bisa merealisasinya."

● FISRI RIANA

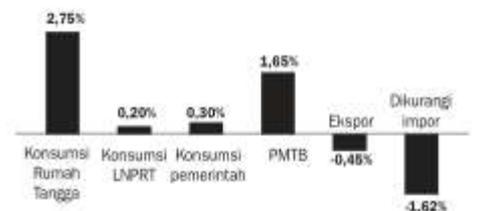
Ditopang Konsumsi

KONSUMSI rumah tangga masih menjadi penopang utama produk domestik bruto (PDB). Sementara itu, pergerakan nilai tukar rupiah yang masih fluktuatif menyebabkan stance Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan di level 6 persen sejak November 2018.

Sumber Pertumbuhan PDB Triwulan I 2019



Sumber Pertumbuhan PDB Triwulan I 2019 Menurut Pengeluaran



Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Rp/US\$)



*) LNPR: Lembaga non-profit yang melayani rumah tangga
 **) PMTB: Pembentukan modal tetap bruto (investasi)
 ***) Lainnya termasuk perubahan inventori (2,89%); impor net (-0,26%), dan disekrepani 53659K (0,67%)

● GHODA RAHMAH | SUMBER: BPS, BI

Judul	Berharap Dana Talangan Cepat Cair	Tanggal	Rabu, 10 Juli 2019
Media	Bisnis Indonesia		
Resume	Pemerintah telah mempraktikkan skema pembayaran langsung pengadaan lahan yang baru		

Berharap Dana Talangan Cepat Cair

Tidak terasa, sudah 4 tahun badan usaha jalan tol (BUJT) 'dibebani' tugas untuk menalangi biaya pembebasan lahan proyek jalan tol yang masuk ke dalam daftar proyek strategis nasional (PSN).



Krista P. Khamil
kristapub@bisnis.com

Namun, bebannya saat ini sudah sedikit menyusut karena pemerintah telah mempraktikkan skema pembayaran langsung pengadaan lahan yang baru.

Dengan skema pembayaran langsung, anggaran pembebasan lahan PSN jalan tol bisa dibayarkan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) secara langsung kepada pemilik lahan.

Kenyataannya, hingga kini masih ada BUJT yang masih harus menguras kantong terlebih dahulu untuk menalangi proyek yang pengadaan tanahnya dijamin oleh negara.

Berdasarkan catatan Bisnis, salah satu BUJT yang masih

kesulitan untuk menerima penggantian dana talangan adalah PT Waskita Toll Road (WTR) di ruas tol Pasuruan—Probolinggo (Paspu) dan Krian—Legundi—Bunder—Manyar (KLESM).

Padahal sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sudah memutuskan bahwa 2 ruas tol ini pasti akan dibayarkan oleh pemerintah melalui LMAN.

Namun, sampai saat ini ternyata hal itu tidak dibayarkan oleh LMAN dengan alasan kedua ruas tol ini tanahnya sudah mulai dibebaskan sebelum masuk dalam daftar proyek strategis nasional (PSN).

"Rp1,6 triliun dari LMAN enggak mau ganti, makanya Menteri PUPR sempat mengajukan itu [2 ruas tol ini] dialokasikan dananya. Sudah LO saja dapat dibayarkan, tetapi tetap bersikeras tidak bisa," papar Direktur Utama PT Waskita Toll Road (WTR) Herwidaktin baru-baru ini.

Saat awal pembebasan tanah sebelum proyek tersebut masuk PSN, WTR sudah menggelorakan Rp550 miliar untuk pembebasan lahan tol KLBM di luar ruas Bunder—Manyar. Adapun, total kebutuhan pendanaannya diperkirakan mencapai Rp1,1 triliun.

"Ini jadi tidak balance harusnya kan kalau sudah dianggarkan di pemerintahan sudah melalui verifikasi, kita tidak melangar aturan mbok ya setelah audit lolos cepat-cepat dibayar, ini masih masuk LMAN," ujar Herwi.

Seperti diketahui, dalam empat tahun terakhir, LMAN berkewajiban membayar pembebasan lahan PSN yang dalam praktik-

nya mesti ditalangi badan usaha lebih dahulu karena infleksibilitas pencairan dana APBN.

Pasalnya, alokasi APBN untuk dana pembebasan lahan PSN dilakukan di awal tahun tetapi pencairan dana baru bisa dilakukan pada akhir tahun. Di sisi lain, pembangunan proyek harus terus berjalan kendati anggaran pembebasan lahan belum turun.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono telah berdiskusi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait dengan dana talangan LMAN.

Dalam surat balasan dengan Nomor S-492/MK.06/2019 tersebut, Kementerian Keuangan telah menyetujui alokasi pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional (PSN) berupa jalan tol Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019.

Dalam surat tersebut, dilampirkan daftar proyek pendanaan pengadaan tanah tahun anggaran 2019 berupa infrastruktur jalan tol, dengan total sekitar Rp36 triliun.

Basuki menilai, persetujuan

yang dimaksud oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati adalah dana talangan yang bisa dibayar langsung dari LMAN.

"Nanti hari Kamis ini, makanya ada MoU antara BPJT [Badan Pengatur Jalan Tol] yang jalan tol misalnya untuk mengubah alokasi tiap-tiap ruas sesuai dengan yang sudah ditujui oleh Menkeu," tuturnya.

Direktur LMAN Rahayu Puspasari mengatakan bahwa persetujuan Menkeu ini merupakan izin prinsip untuk menyelesaikan pembayaran pengembalian dana talangan, dengan proses selanjutnya adalah penandatanganan nota kesepahaman.

"Adapun proses selanjutnya adalah penandatanganan MOU antara LMAN, BPJT dan BUJT terkait. MOU ini adalah bridging antara PPT [Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol] dan kewajiban bayar tanah oleh LMAN," ujarnya.

Mevurut wanita yang akrab disapa Puspa ini, sesudah MOU ditandatangani, apabila ingin mengklaim pembayaran atas

dana talangan dari kementerian (pejabat pembuat komitmen, PPK) akan melengkapi semua persyaratan dokumen dan menyampulkannya ke BPJT.

Selanjutnya, BPJT akan meminta melalui LMAN agar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melaksanakan verifikasi atau review dan jika sudah menerbitkan laporan hasil verifikasi, maka akan disampaikan ke LMAN untuk dimintakan pembayaran.

PROSES SEDERHANA

Puspa menegaskan bahwa selama ini orang salah memahami prinsip dana talangan bahwa jika izin prinsip sudah terbit, dianggarnya LMAN harus langsung membayarnya.

"Padahal untuk memenuhi tata kelola serangkaian proses persyaratan harus terlebih dahulu dipenuhi sebelum akhirnya nanti bisa ditagihkan ke LMAN," katanya.

Menilai dari lamanya dana talangan dikembalikan ke BUJT oleh LMAN, hal ini mengisyaratkan bahwa proses verifikasi antara LMAN dan juga BPKP

bertele-tele sehingga dana talangan tak kunjung dibayarkan oleh LMAN sebagai ujung tombak pembayaran.

Basuki mengakui bahwa proses verifikasi ini terlalu sering muter-muter, meski sudah ada jalan keluarnya yakni segera disertifikasi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia, tetapi tetap saja masih memakan waktu.

"Upaya penyederhanaan dari kami adalah melengkapi data dulu sebelum diserahkan, dicek dulu apa lagi yang kurang," ujarnya.

Bisa disimpulkan bahwa memang inilah proses yang harus dilalui Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dalam penggantian dana talangan tanah.

Sementara itu, uang dana talangan ini apabila dikembalikan secara cepat dapat digunakan BUJT untuk kembali membangun proyek-proyek lain.

Pemerintah masih harus memutar otak, mencari jalan keluar terbaik demi keberlangsungan pembangunan infrastruktur di Indonesia. ■

► Dalam surat balasan dengan Nomor S-492/MK.06/2019 tersebut, Kementerian Keuangan telah menyetujui alokasi pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional (PSN) berupa jalan tol Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019.

► Basuki mengakui proses verifikasi ini terlalu sering 'muter-muter', meski sudah ada jalan keluarnya yakni segera disertifikasi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia, tetapi tetap saja masih memakan waktu.

Judul	Kementerian PUPR Pacu Penyerapan	Tanggal	Rabu, 10 Juli 2019
Media	Bisnis Indonesia		
Resume	Realisasi penyerapan anggaran 2019 cukup rendah sebesar 26,18% per 8 Juli 2019. Hingga akhir tahun penyerapan diestimasi bakal mencapai 92,75%		

Kementerian PUPR Pacu Penyerapan

Bisnis, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat realisasi penyerapan anggaran tahun 2019 cukup rendah, sebesar 26,18% per 8 Juli 2019. Hingga akhir tahun, realisasi penyerapan diestimasi bakal mencapai 92,75% berkat realisasi pekerjaan-pekerjaan yang telah terkontrak.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan penggunaan anggaran hingga paruh pertama tahun ini lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional di level 40%. Dia menambahkan ada sejumlah faktor yang membuat kinerja penggunaan anggaran di bawah rata-rata nasional.

"Di PUPR ada reorganiasi, lalu ada pemilahan umum dan juga hari raya. Kami kira ini Insyaallah masih oke. Semester kedua ini tinggal percepatan karena paket belum lelang itu relatif kecil," ujarnya menjawab pertanyaan *Bisnis*, Selasa (9/7).

Sebelumnya, pada 2019 Kementerian PUPR mendapat alokasi anggaran sebanyak Rp117,81 triliun. Hingga 8 Juli 2019, progres fisik baru mencapai 27,36%.

Direktorat Jenderal Cipta Kerja

menjadi direktorat dengan progres fisik terendah sebesar 9,58% sedangkan BPSDM tercatat memiliki progres tertinggi di level 47,30%.

Basuki menuturkan, penyerapan anggaran maupun progres fisik bakal terus meningkat hingga penghujung tahun karena sebagian besar paket lelang sudah terkontrak. Per 9 Juli 2019, sebanyak 4.304 paket atau 67,5% dari jumlah paket yang dilelang senilai Rp39,4 triliun sudah terkontrak.

Sementara itu, sebanyak 1.764 paket atau 27,6% paket yang dilelang senilai Rp20,4 triliun masih dalam proses lelang.

Jumlah paket yang belum dilelang tersisa 313 paket atau 4,9% senilai Rp6,6 triliun. Ditjen Sumber Daya Air dan Ditjen Bina Marga menjadi direktorat paling banyak menuntaskan proses lelang, masing-masing 1.877 paket dan 1.688 paket.

Basuki saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR beberapa waktu lalu menyatakan, kementerian itu menitikberatkan program pembangunan pada 2020 terdistribusi untuk pembangunan infrastruktur sumber daya air, jalan, dan pembentukan Balai Cipta Karya. *(Rivki Maulana)*

Judul	Pembangunan Tetap Dimulai 2020	Tanggal	Rabu, 10 Juli 2019
Media	Bisnis Indonesia		
Resume	Untuk pembangunan Jembatan Batam dan Bintan dalam rangka upaya pengembangan wilayah.		

Pembangunan Tetap Dimulai 2020

Bisnis, JAKARTA — Rencana pemerintah untuk membangun jembatan yang menghubungkan Pulau Batam dengan Pulau Bintan di Kepulauan Riau kian menemui titik terang. Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan pembangunan akan dimulai pada 2020.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, saat ini pihaknya tengah menyusun desain teknis atau *detail engineering design* (DED) dan diharapkan bisa rampung tahun ini. Dia menambahkan, anggaran pembangunan jembatan bakal menggunakan skema tahun jamak atau *multiyears contract* (MYC).

"Saya mau ke sana untuk tutup Bendungan Sei Gong sambil melihat jalur jembatan. Ini sudah diputuskan Presiden untuk dibangun," ujarnya menjawab pertanyaan

Bisnis, Selasa (9/7).

Basuki menuturkan, biaya pembangunan jembatan diperkirakan mencapai Rp3 triliun hingga Rp4 triliun. Namun, dia menekankan biaya pembangunan akan tergantung pada hasil desain yang saat ini disusun. Dalam catatan *Bisnis*, Jembatan Batam Bintan akan dibangun sepanjang 6,4 kilometer, menghubungkan dua pulau paling sibuk di Kepulauan Riau.

Menurut Basuki, keberadaan Jembatan Batam Bintan akan memantik geliat beragam aktivitas ekonomi di Kepulauan Riau. Jembatan yang telah digagas sejak 2007 itu juga diestimasi bakal mengungkit gairah sektor pariwisata di Batam dan Bintan yang berhadapan langsung dengan Singapura.

"Singapura kan sedang buat Terminal 5 Changi yang itu intermoda sampai ke Bintan,"

tutur Basuki.

Di sisi lain, Kementerian PUPR membuka peluang partisipasi badan usaha dalam pembangunan Jembatan Batam Bintan. Partisipasi tersebut bisa dalam bentuk kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Namun, skema pembiayaan itu akan tergantung pada hasil studi.

Basuki sebelumnya mengatakan, pembangunan jembatan ini akan dimulai paling lambat tahun 2020 dikarenakan desainnya yang panjang. Jembatan ini merupakan jembatan dengan tiga tapak yakni Tanjung Talok, Pulau Menang, Tanjung Sau dan Loban, dan pembangunannya membutuhkan dana sebesar Rp4 triliun-Rp5 triliun.

Sementara itu, Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan dan Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru bertemu di sela-sela rapat koordinasi gu-

bernur se-Sumatra di Bengkulu untuk mematangkan usulan pembangunan Jembatan Selat Bangka yang menghubungkan Provinsi Sumsel dan Babel.

"Kami sudah sepakat dan usulan sudah matang, segera diusulkan ke menteri," kata Gubernur Babel Erzaldi Rosman Djohan seperti dikutip dari *Antara* di Bengkulu, Selasa (9/7).

Pertemuan singkat itu, menurut Erzaldi, hanya pematangan rencana usulan pembangunan jembatan sepanjang 13,50 kilometer yang sudah digagas sejak 2 tahun lalu.

Pertemuan terakhir kedua kepala daerah ini bertujuan untuk mengusulkan pembangunan jembatan yang menghubungkan daratan kedua provinsi terjadi pada November 2018 saat penandatanganan nota kesepahaman perpanjangan kerja sama pembangunan jembatan tersebut. *(Rivki Maulana)*